



Ringkasan Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dengan sasaran yang diterapkan melalui kegiatan dan anggarannya kepada seluruh *stakeholder* baik berupa kegagalan maupun keberhasilannya.

Laporan Kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2024 menyajikan semua capaian kinerja selaras dengan program (*performance results*) yang membandingkan antara realisasi dengan rencana kinerja (*performance plan*) *level output* maupun *outcome* kegiatan sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi.

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang merupakan komitmen seluruh unsur di Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu dalam merealisasikan tanggungjawab kepada *stakeholder*. Target dan indikator kinerja dalam Penetapan Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu Tahun 2024.

Capaian kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persen Capaian
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah Yang Ditindak Lanjuti	100 %	100%	98,36%
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Rumusan Kebijakan BUMD dan BLUD	Persentase Rumusan Kebijakan BUMD dan BLUD Yang Ditindak lanjut	100 %	100%	98,80%



Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam (SDA)	Persentase Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam (SDA) yang ditindak lanjuti	100 %	100%	90,59%
Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Persentase Peningkatan tata kelola kinerja Biro Perekonomian	100 %	100%	94,7%

Dari tabel capaian kinerja tahun 2024 di atas, telah tergambar keberhasilan Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu dalam pencapaian Sasaran kinerja melalui indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu mengharapkan bahwa Laporan Kinerja untuk tahun anggaran 2024 ini dapat dijadikan motivasi bagi ASN untuk dapat bekerja lebih maksimal lagi sehingga dapat mengatasi tantangan dan hambatan pada masa yang akan datang.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-NYA sehingga Laporan Kinerja Biro Perekonomian Setda Pintu Provinsi Bengkulu untuk tahun anggaran 2024 ini dapat diselesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan kewajiban sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja diwajibkan menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan penggunaan anggaran yang dialokasikan.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama tahun Biro Perekonomian Setda Pintu Provinsi Bengkulu mengacu kepada pengukuran kinerja yang merupakan layanan proses dari rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana strategis (Renstra) Biro Perekonomian Setda Pintu Provinsi Bengkulu tahun 2021 – 2026. Laporan Kinerja antara lain memuat data Pengukuran Kinerja, Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran dan Analisis Akuntabilitas Keuangan, serta memuat informasi mengenai pendukung capaian kinerja/penghambat capaian kinerja Biro Perekonomian Setda Pintu Provinsi Bengkulu Tahun 2024 dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Biro Perekonomian Setda Pintu Provinsi Bengkulu tahun 2024 ini masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan. Semoga Laporan Kinerja Biro Perekonomian Setda Pintu Provinsi Bengkulu tahun 2024 ini dapat dijadikan media untuk membangun kebersamaan berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran, dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik bagi kemajuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu selanjutnya. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu melindungi kita semua.

Bengkulu, Januari 2025

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI BENGKULU

HAFNI, S.E.,M.AP
Pembina Utama (IV/a)
NIP. 19760318 201001 1 002



DAFTAR ISI

	HALAMAN
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	
A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI	5
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	7
C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	10
D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE)	11
E. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA	11
F. SUMBER DAYA MANUSIA	12
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS	13
B. TUJUAN	14
C. SASARAN, INDIKATOR KINERJA, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	14
D. PROGRAM/KEGIATAN TAHUNAN KINERJA TAHUNAN	16
E. PERJANJIAN KINERJA	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	
A. PENCAPAIAN KINERJA	18
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	29
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	31
B. SARAN-SARAN	31



BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Penggunaan anggaran yang dialokasikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja suatu instansi pemerintah. Fungsi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Biro Perekonomian ini adalah sebagai berikut :

1. Wujud tertulis pertanggungjawaban Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu terhadap mandat dan kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai oleh Biro Perekonomian.
2. LAKIP Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi dan merupakan akuntabilitas kerja Biro Perekonomian.
3. Sebagai media informasi tentang sejauh mana penentuan prinsip-prinsip good government termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di Biro Perekonomian.
4. Menjadi Biro yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Adapun dasar hukum pembentukan organisasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 nomor 8);



13. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 1);

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

Biro Perekonomian di pimpin oleh seorang Kepala Biro

Kepala Biro mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menyiapkan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah.

Kepala Biro menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Lanan Umum Daerah;
 - c. menyiapkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. mengikuti rapat yang berkaitan dengan perekonomian sesuai disposisi atasan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Biro Perekonomian terdiri atas :

1. Bagian Kebijakan perekonomian
2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana



Bagian Kebijakan Perekonomian di pimpin oleh Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian

Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha.

Bagian Kebijakan Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas bagian kebijakan perekonomian.
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha.
- c. Penyiapan bahan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha.
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha.
- e. Menghadiri rapat yang berkaitan dengan kebijakan perekonomian sesuai disposisi atasan
- f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bagian Kebijakan Perekonomian
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bagian Kebijakan Perekonomian
- h. Pelakasanaan tugas yang diberikan atasan

Bagian Kebijakan Perekonomian terdiri atas :

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksana

Subbag Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana tugas Sub Bagian Tata Usaha
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup biro



- c. Pelaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan
- d. Pelaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan kearsipan lingkup biro.
- e. Pelaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan lingkup biro.
- f. Pelaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro.
- g. Pelaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro.
- h. Pelaksanakan review Kerangka Acuan Kerja Program dan Kegiatan Lingkup biro
- i. Pelaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro
- j. Pelaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan lingkup biro
- k. Pelaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan lingkup biro
- l. Pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN lingkup biro
- m. Menghadiri rapat yang berkaitan dengan ketatausahaan sesuai disposisi atasan.
- n. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha
- o. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Bagian Kebijakan Perekonomian

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Bagian Kebijakan Perekonomian mempunyai tugas memberi pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan serta dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

Tim Kerja Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana meliputi :

- a. Tim Kerja Analisis Ekonomi Makro
- b. Tim Kerja Analisis Ekonomi Mikro



Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di Biro Perekonomian

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di Biro Perekonomian mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan serta dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi

Tim Kerja Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di Biro Perekonomian meliputi :

1. Tim kerja Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Jasa
2. Tim kerja Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
3. Tim Kerja Badan Layanan Umum Daerah
4. Tim Kerja Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
5. Tim Kerja Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup
6. Tim Kerja Sumber Daya Alam Energi dan Air

C. Aspek Strategis Organisasi

Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu yang mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah. Oleh sebab itu Biro Perekonomian mempunyai peranan yang sangat penting dalam memfasilitasi perkembangan perekonomian baik di tingkat kabupaten/Kota dan Provinsi Bengkulu itu sendiri maupun di tingkat nasional.

Dan untuk itu Biro Perekonomian dalam melaksanakan kinerja organisasinya yang menunjang tugas pokok dan fungsinya di bidang perekonomian maka pokok-pokok pikiran tugas, fungsi, kinerja permasalahan dan tantangan, visi, misi, tujuan dan sasaran strategi dan program dan kegiatan pelaksanaan organisasinya dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu yang digunakan sebagai arahan pokok dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pada Sekretariat Provinsi Bengkulu di mana Biro Perekonomian merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. Pelaksanaan Renstra 2021-2026 Biro Perekonomian dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) 1 tahun berjalan. Dalam hal ini Renja merupakan pedoman penyusunan Rencana Anggaran dan Pembelajaan Belanja Daerah



(RAPBD). Anggaran dan Belanja Program dan Kegiatan tersebut merupakan penunjang dalam pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di bidang perekonomian.

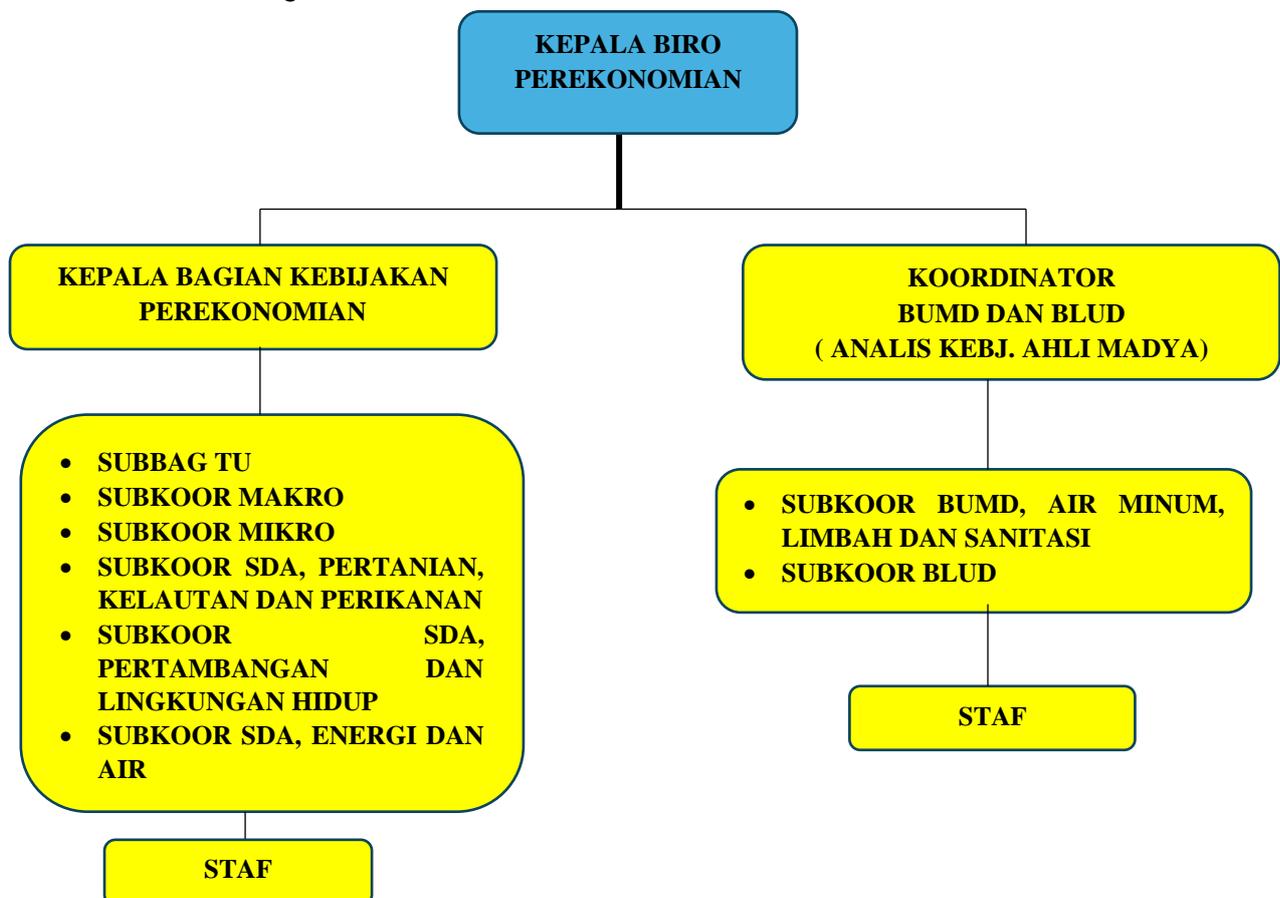
D. Permasalahan Utama (Strategic Issue)

Beberapa permasalahan dan Isu Strategis yang dihadapi Biro Perekonomian adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya Kualitas Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah
2. Terlaksananya Kualitas Peningkatan Rumusan Kebijakan BUMD dan BLUD
3. Terlaksananya Kualitas Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam (SDA)
4. Terlaksananya Tata Kelola Kinerja OPD

E. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu, berikut adalah struktur Organisasi Biro Perekonomian :





F. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia sangat penting dalam pelaksanaan kinerja suatu organisasi berikut ini adalah Data kepegawaian Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu Tahun 2024 :

DATA PEGAWAI													
JUMLAH PEGAWAI		TINGKAT PENDIDIKAN							KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN				
LAKI-LAKI	PEREMPUAN	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL
18	30	0	0	2	0	33	13	48	0	3	39	6	48



BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Gubernur terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 telah menetapkan Visi Gubernur Provinsi Bengkulu 2021-2024 : Bengkulu Maju, Hebat, dan Sejahtera. Biro Perekonomian melalui Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu dalam mendukung visi Gubernur Bengkulu 2021-2024 adalah sebagai berikut :

a. Bengkulu Maju

Mewujudkan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan infrastruktur dasar yang berkualitas dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berintegritas menjadikan Provinsi Bengkulu sejajar dengan provinsi-provinsi di Indonesia

b. Bengkulu Sejahtera

Mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat, serta kebijakan pembangunan yang adil serta kemudahan akses, menjamin rasa aman dan nyaman dalam keberagaman, toleransi yang kuat dengan landasan keimanan dan ketakwaan.

c. Bengkulu Hebat

Mewujudkan Bengkulu yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif yang di dukung dengan kebanggaan potensi yang dimiliki, optimis dan rasa percaya diri masyarakat, berintegritas serta bermatabat. Mendorong serta melibatkan kaum muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan (SDM maupun infrastruktur).



2. Misi

- a. Mewujudkan ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif
- b. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan.
- c. Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan profesional serta transformasi pelayanan publik
- d. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berbudaya, toleransi dan religius.

B. Tujuan

Tujuan Biro Perekonomian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah meningkatkan kualitas rumusan kebijakan perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA).

Indikator tujuan : persentase rumusan kebijakan perekonomian dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti.

C. Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi dan Kebijakan

I. AKUNTABILITAS KINERJA UTAMA

Sasaran 1 :

Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan perekonomian daerah

Indikator Sasaran :

Persentase rumusan kebijakan perekonomian yang di tindak lanjuti

- Jumlah rumusan kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total kegiatan pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian X 100%

Strategi :

- Terkendalinya Inflasi di provinsi Bengkulu
- Meningkatkan Jumlah Koperasi yang sehat, Meningkatkan Jumlah Penyaluran KUR dan Kuota BBM Subsidi
- Meningkatkan Jumlah Produk Unggulan Daerah
- Meningkatkan Efektifitas Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah



- Meningkatnya Rekomendasi Kebijakan Pariwisata Daerah

Kebijakan : Terlaksananya Kualitas Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah

Sasaran 2 :

Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan BUMD dan BLUD

Indikator Sasaran :

Persentase rumusan kebijakan BUMD dan BLUD yang ditindaklanjuti.

- Jumlah Rumusan Kebijakan BUMD dan BLUD yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD X 100%

Strategi :

Penyusunan rumusan hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Kebijakan BUMD, Jasa Keuangan dan Aneka Usaha

Kebijakan : Penyusunan rumusan hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Kebijakan BUMD, Jasa Keuangan dan Aneka Usaha

Sasaran 3 :

Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan Sumber Daya Alam (SDA).

Indikator Sasaran :

Persentase rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam (SDA) yang ditindaklanjuti

Strategi :

Rumusan hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.

- Jumlah Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam (SDA) yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total kegiatan Pengelolaan Kebijakan Dan Koordinasi Sumber Daya Alam (SDA) X 100%

Kebijakan : Penyusunan rumusan hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Sasaran 4 :

Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD

Indikator Sasaran :

Persentase peningkatan Tata kelola Kinerja OPD

- Jumlah Pelaksanaan Tata Kelola Kinerja OPD dibagi jumlah total Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi X 100%



Kebijakan : Peningkatan Tata Kelola Kinerja OPD

II. AKUNTABILITAS KINERJA PRIORITAS

Sasaran :

Pengendalian Stabilisasi Inflasi Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Kebijakan Ekonomi Makro

Kebijakan : Tersedianya dokumen kebijakan ekonomi makro

III. AKUNTABILITAS KINERJA KHUSUS

Indikator kinerja Sasaran :

1. Nilai RB OPD
2. Nilai Evaluasi LAKIP OPD
3. Persentase tindak lanjut LHP OPD
4. Nilai LPPD OPD
5. Kategori Inovasi OPD
6. Indeks keterbukaan Informasi Publik OPD
7. Persentase Pencapaian MCP Redaksi KPK
8. Nilai Realisasi TEPPRA
9. Nilai Profesionalisme ASN

D. Program/Kegiatan Rencana Kinerja Tahunan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Kegiatan :

Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan logistic kantor
2. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD

2. Kegiatan :

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah

2. Program Perekonomian dan Pembangunan

1. Kegiatan :

Pengelolaan Kebijakan Dan Koordinasi Perekonomian

Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro



Sub kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro

2. Kegiatan :

Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, Jasa Keuangan dan Aneka Usaha

3. Kegiatan : Pengelolaan Kebijakan Dan Koordinasi Sumber Daya Alam

Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.

E. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Eselon II, III dan IV telah disusun satu dokumen tersendiri dan telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu dan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Akuntabilitas Kinerja

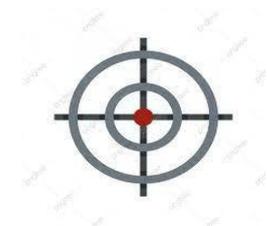
Akuntabilitas kinerja pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik atau akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi.

Akuntabilitas Kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu merupakan bentuk pertanggungjawabana kinerja selama tahun 2024 yang memuat realisasi kinerja dan capaian atas target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam target kinerja dengan realisasinya.

Dan dari hasil capaian kinerja tersebut akan diketahui keberhasilan dan kegagalan setiap indikator kinerja. Dan keberhasilan atau kegagalan tersebut dibutuhkan suatu analisis tentang factor-faktor pendukung dan penghambatnya.

Analisis pencapaian kinerja menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan misi, visi dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis (RENSTRA). Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Adapun Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi dengan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja			
				Tahun 2023		Tahun 2024	
				Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Persentase Rumusan Kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	%	100 %	100	100%	100 %	100%

Sumber : Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya kualitas rumusan kebijakan perekonomian daerah terealisasi 100% yaitu 6 Dokumen . Berikut ini realiasi capaian indikator kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel capaian Indikator kinerja :

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Terkendalinya Inflasi di provinsi Bengkulu	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
2.	Meningkatnya Jumlah Koperasi yang sehat, Meningkatkan Jumlah Penyaluran KUR dan Kuota BBM Subsidi	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
3	Meningkatnya Jumlah Produk Unggulan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
4	Meningkatnya Efektifitas Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
5	Meningkatnya Rekomendasi Kebijakan Pariwisata Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %



Sasaran Meningkatnya Kualitas Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah termasuk kedalam Program Perekonomian dan Pembangunan dengan kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian yang terbagi lagi ke dalam 2 sub kegiatan yaitu Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dengan pagu anggaran Rp. 255.000.000,- dengan realisasi Rp. 252.177.346,- dan persentase capaian 98,89%, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro dengan pagu anggaran Rp. 300.000.000,- dengan realisasi Rp. 293.525.531,- dan persentase capaian 97,84%.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Ekonomi Setda Provinsi Bengkulu telah tercapai dengan adanya 6 dokumen rumusan kebijakan perekonomian.

Dan untuk Indikator Kinerja dalam kegiatan prioritas yang tertuang di Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu yang targetnya adalah 1 dokumen kebijakan Ekonomi Makro juga telah tercapai..

Adapun factor pendukung tercapainya indicator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia di Biro Perekonomian yang mendukung.
2. Terlaksananya program-program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang meningkatkan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat khususnya kepada para pelaku UMKM dan entrepreneur muda dalam rangka mendorong perekonomian daerah.
3. Terlaksananya kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat dengan bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu, Bank Indonesia, Dirjen Perbendaharaan serta pihak Industri Jasa Keuangan yang ada di Provinsi Bengkulu.

Program dan Kegiatan yang mendukung tercapainya capaian kinerja adalah sebagai berikut :

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pagu	Realisasi	Persen
Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	555.000.000	545.702.877	98,36 %
Sub Kegiatan :			
1. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	255.000.000	252.177.346	98,89 %
2. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	300.000.000	293.525.531	97,84 %



Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro bertujuan untuk memfasilitasi Kebijakan Ekonomi Makro di Provinsi Bengkulu terutama dalam menjaga kestabilan inflasi di Provinsi Bengkulu. Pada Kegiatan ini dilaksanakan konsultasi ke TPIP (Kemenko Perekonomian, Kemendagri dan Bank Indonesia) serta koordinasi dengan TPID Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu dalam menjaga kestabilan inflasi tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan juga High Level Meeting TPID dan Rakor TPID yang melibatkan TPID Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu. Di samping itu juga dilakukan rapat-rapat teknis TPID, GPM, operasi pasar, sidak pasar dan monitoring dan evaluasi kegiatan pengendalian inflasi di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu. Untuk menambah pengetahuan bagi anggota TPID Se-Provinsi Bengkulu maka dilakukan Sosialisasi dan Capacity Building TPID. Pada Kegiatan ini melibatkan Forkopimda Provinsi Bengkulu. Instansi vertical yang terkait dengan pengendalian inflasi dan OPD teknis yang berkaitan langsung dengan pengendalian inflasi di Provinsi Bengkulu.

Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro merupakan Indikator Kinerja dalam **kegiatan prioritas perangkat daerah** yang tertuang di Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu.

Sedangkan Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro juga merupakan kegiatan factor pendukung tercapainya dokumen rumusan kebijakan perekonomian dalam Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu.

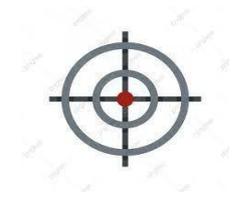
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro bertujuan untuk peningkatan dan percepatan akses keuangan daerah seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu bertujuan :

- mensinergikan perumusan perekonomian bagi Pemerintah terkait dengan kebijakan dalam rangka perluasan akses keuangan bagi masyarakat Provinsi Bengkulu.
- terlaksananya kegiatan Bussines Matching dan Sosialisasi untuk para pelaku usaha UMKM Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu dan melakukan edukasi keuangan kepada pelajar dan ASN Provinsi Bengkulu.
- tersalurnya BBM secara aman dan tertib dan gas LPG 3 kg sesuai dengan sasaran



Sasaran 2

Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan BUMD dan BLUD



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja			
				Tahun 2023		Tahun 2024	
				Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Persentase Rumusan Kebijakan BUMD dan BLUD yang ditindak lanjuti	%	100%	100	100%	100	100%

Sumber: Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa sasaran Meningkatnya Kualitas Rumusan Kebijakan BUMD dan BLUD terealisasi 100% yaitu 2 Dokumen . Berikut ini realiasi capaian indikator kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel capaian Indikator kinerja :

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Rumusan hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Kebijakan BUMD, Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Sasaran Meningkatnya Kualitas Rumusan Kebijakan BUMD dan BLUD termasuk kedalam Program Perekonomian dan Pembangunan dengan kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dengan pagu anggaran Rp. 70.000.000,- dengan realisasi Rp. 69.162.251,- dan persentase capaian 98,80%.



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Ekonomi Setda Provinsi Bengkulu telah tercapai dengan adanya 2 dokumen rumusan kebijakan BUMD dan BLUD yang di dalamnya merupakan Rumusan hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Kebijakan BUMD, Jasa Keuangan dan Aneka Usaha.

Adapun factor pendukung tercapainya indicator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya fungsi koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD jasa keuangan dan aneka usaha di Provinsi Bengkulu dan di peroleh data BUMD Se-Provinsi Bengkulu.
2. Terlaksananya Review kelayakan Investasi Review kelayakan investasi pemyertaan modal Pemda Provinsi Bengkulu kepada PT Bimex pada tahun 2024.
3. Komitmen yang kuat antara para pejabat dan pegawai di lingkungan unit kerja sehingga pelaksanaan kegiatan dan anggaran dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan capaian kinerja dan anggaran yang optimal serta sesuai dengan target yang telah di tetapkan.

Program dan Kegiatan yang mendukung tercapainya capaian kinerja adalah sebagai berikut :

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PAGU	REALISASI	PERSEN
Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	70.000.000	69.162.251	98,80%
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	70.000.000	69.162.251	98,80%



Sasaran 3

Meningkatnya Kualitas Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam (SDA)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja			
				Tahun 2023		Tahun 2024	
				Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Persentase Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam (SDA) yang ditindak lanjuti	%	100%	100	100%	100	100%

Sumber: Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa sasaran Meningkatkan Kualitas Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam (SDA) terealisasi 100% yaitu 1 Dokumen . Berikut ini realiasi capaian indikator kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel capaian Indikator kinerja :

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Rumusan hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Sasaran meningkatnya kualitas rumusan kebijakan sumber daya alam (SDA) termasuk kedalam Program Perekonomian dan Pembangunan dengan kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam dengan sub kegiatan yaitu , sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dengan Pagu Anggaran Rp. 100.000.000,- setelah APBD Perubahan pagu anggaran menjadi Rp. 179.068.000,- dengan realisasi Rp. 162.232.797,- dan persentase capaian 90,59%.

Dari tabel capaian indicator Kinerja di atas dapat dilihat bahwa persentase rumusan kebijakan Sumber Daya Alam (SDA) yang menghasilkan 1 dokumen Rumusan hasil Koordinasi,



Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan telah tercapai 100% sesuai dengan target yang di tetapkan dalam Perjanjian kinerja antara Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu dengan Sekda Provinsi Bengkulu.

Adapun factor pendukung tercapainya indicator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait di bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.
2. Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan ruang laut dan udara di Provinsi Bengkulu (peningkatan ekspor)
3. Terkumpulnya data terkait bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.

Program dan Kegiatan yang mendukung tercapainya capaian kinerja adalah sebagai berikut :

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PAGU	REALISASI	PERSEN
Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	179.068.000	162.232.797	90,59%
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	179.068.000	162.232.797	90,59%

Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dilaksanakan untuk mewujudkan fungsi dan koordinasi serta sinkronisasi dalam peningkatan kerjasama natar pemerintah daerah dan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.

Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan bertujuan :

1. Adanya koordinasi, pembinaan dan monitoring dengan dinas/instansi terkait dalam Provinsi Bengkulu yang berhubungan dengan kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
2. Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dalam bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
3. Menghimpun data-data yang berkaitan dengan kegiatan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.



Sasaran 4

Meningkatnya tata Kelola kinerja OPD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja			
				Tahun 2023		Tahun 2024	
				Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Persentase Peningkatan tata kelola kinerja Biro Perekonomian	%	100%	100	100%	100	100%

Sumber: Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa sasaran Meningkatkan Tata Kelola Kinerja OPD 100% yaitu 7 Dokumen, 6 paket dan 30 Laporan . Berikut ini realiasi capaian indikator kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel capaian Indikator kinerja :

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian %
1	Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6 paket	6 paket	100%
3	Dokumen Perjalanan Dinas	30 Laporan	30 Laporan	100%

Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Kinerja OPD termasuk kedalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan pagu anggaran Rp. 71.000.000,- dengan realisasi Rp.68.348.594,- dan persentase capaian 96,27%. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terbagi lagi kedalam 2 sub kegiatan yaitu, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu anggaran Rp. 75.000.000,- setelah APBD Perubahan pagu anggaran menjadi Rp.125.000.000,- dengan realisasi Rp.122.315.300,- dan persentase capaian 97,85%,Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran Rp.200.000.000,- setelah APBD Perubahan pagu anggaran menjadi Rp. 300.000.000,- dan yang teralisasi Rp.264.219.470,- dengan persentase capaian 88,07%.



Dengan uraian di atas maka target capaian kinerja meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD dengan indikator kinerja persentase peningkatan Tata Kelola Kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja mencapai 100 %.

Keberhasilan pencapaian kinerja yang di lihat dari tabel capaian indicator Kinerja tersebut di atas maka faktor-faktor pendukung sebagai berikut :

1. Adanya dukungan penuh dari Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Adanya komitmen kerja yang tinggi dari para ASN Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan kualitas kinerja yang baik sesuai TUPOKSI Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu.
3. Perencanaan kerja yang lebih baik dan matang dalam melaksanakan kegiatan.

Program dan Kegiatan yang mendukung tercapainya capaian kinerja adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAGU	REALISASI	PERSEN
	496.000.000	454.883.364	94,7%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.000.000	68,348,594	96,27%
Sub Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	71.000.000	68.348.594	96,27%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	425.000000	386,534,770	92,96%
Sub Kegiatan 1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.000.000	122.315.300	97,85%
2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000	264.219.470	88,07%

Tabel Pengukuran Kinerja



Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

OPD/Unit Kerja Mandiri : Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu
Tahun Anggaran : 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah Yang Ditindak Lanjuti	100 %	Rp. 545.702.877	98,36%
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Rumusan Kebijakan BUMD dan BLUD	Persentase Rumusan Kebijakan BUMD dan BLUD Yang Ditindak lanjut	100 %	Rp. 69.162.251,-	98,80%
Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam (SDA)	Persentase Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam (SDA) yang ditindak lanjut	100 %	Rp. 166.232.797,-	90,59%
Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Persentase Peningkatan tata kelola kinerja Biro Perekonomian	100 %	Rp. 454.883.364,-	94,7%
Jumlah Anggaran Seluruh Kegiatan Tahun 2024 Rp. 1.300.068.000,- Jumlah Realisasi Anggaran Seluruh Kegiatan Tahun 2024 Rp. 1.231.981.289,-				

Sumber: Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu



B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas Keuangan Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu pada Tahun 2024 bersumber pada dana APBD sebesar **Rp. 1.300.068.000,-**. Akuntabilitas Keuangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Pengukuran Kinerja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan :

NO	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET/ OUTPUT	PAGU (RP.)	Realisasi (Rp.)	Persen
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			496.000.000	454.883.364	94,7%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			71.000.000	68,348,594	96,27%
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	71.000.000	68.348.594	96,27 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			425.000000	386,534,770	92,96%
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	125.000.000	122.315.300	97,85%
	3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Lap	300.000.000	264.219.470	88,07%
B.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			804.068.000	777,097,925	96%
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian			555.000.000	545,702.877	98,36%
	1. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1 Dok	255.000.000	252.177.346	98,89%
	2. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	5 Dok	300.000.000	293.525.531	97,84%
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD			70.000.000	69.162.251	98,80%
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,	2 Dok	70.000.000	69.162.251	98,80%



NO	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET/ OUTPUT	PAGU (RP.)	Realisasi (Rp.)	Persen
		Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam			179.068.000	162,232,797	90,59%
1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	1 Dok	179.068.000	162.232.797	90,59%

Berdasarkan tabel di atas Persentase realisasi anggaran bersumber APBD Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu yaitu 95,35% atau sebesar Rp. 1.231.981.289,-, dari realisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi capaian anggaran telah sesuai dengan target sehingga disimpulkan sangat berhasil.

Pada tahun 2024 total pagu anggaran Rp. 1.300.068.000,- mengalami penurunan sebesar Rp 174.932.000,- dari anggaran Tahun 2023 yang sebesar Rp. 1.475.000.000,- akibat adanya rasionalisasi dan juga capaian kinerja realisasi keuangan di tahun 2004 sedikit mengalami penurunan dibanding capaian kinerja realisasi keuangan tahun 2023 yaitu tahun 2024 capaian realisasinya 95,38 % atau sebesar Rp. 1,231,981,289, dan bila dibandingkan Tahun 2023 capaian realisasi keuangan Rp. 1,428.091,387,- atau sebesar 96,81%.

Ditahun 2022 pagu anggaran hanya sebesar Rp. 918,000,000,- dan dapat dilihat bahwa pagu anggaran Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu di tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami peningkatan anggaran.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Prinsip akuntabilitas kinerja berarti bahwa terdapat keterkaitan yang jelas antara tugas dan fungsi organisasi (struktur organisasi) dengan struktur program dan kegiatan (struktur anggaran).

Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu telah memenuhi kewajibannya dengan menyusun Laporan Kinerja untuk tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian visi misi Gubernur Bengkulu. Diharapkan, Laporan Kinerja 2024 ini dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu di masa depan.

A. KESIMPULAN

Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam tercapainya target kinerja yang diungkapkan dalam Laporan Kinerja ini baik intern maupun ekstern di lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu.

Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi pencapaian kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan penuh dari Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Adanya komitmen kerja yang tinggi dari para ASN Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan kualitas kinerja yang baik sesuai TUPOKSI Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu
3. Perencanaan kerja yang lebih baik dan matang dalam melaksanakan kegiatan.
4. Terlaksananya fungsi Koordinasi yang baik dengan stakeholder baik di pusat maupun di daerah sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang di tetapkan.

B. SARAN-SARAN

Seluruh rangkaian kegiatan capaian kinerja sasaran tersebut diatas pada umumnya telah berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan, Dari hasil evaluasi sasaran kinerja yang telah



dijelaskan sebelumnya, maka terdapat langkah-langkah yang akan dilakukan dimasa mendatang untuk meningkatkan kinerja diantara sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat, Provinsi/kabupaten/kota serta pemangku kepentingan (stakeholder)
2. Identifikasi atas sumber daya yang dimiliki (sumber daya manusia dan sumber daya anggaran) yang hasilnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
3. Komitmen yang kuat antara para pejabat dan pegawai di lingkungan unit kerja sehingga pelaksanaan kegiatan dan anggaran dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan capaian kinerja dan anggaran yang optimal serta sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu Tahun 2024 ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi atau acuan untuk perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu dimasa yang akan datang. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersinergi dan bekerja sangat baik dalam menyelesaikan program kerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu.